

The Urgency of Maritime Policy to Welcome a Golden Indonesia 2045

Lukman Yudho Prakoso^{1*}, Fariel Zulfikar Alman², Rianto³

¹Universitas Pertahanan RI

²Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

³Institut Pariwisata Trisakti

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Urgency, Policy, Maritime, Indonesia, Gold

Received : 06 May

Revised : 26 May

Accepted: 28 June

©2024 Prakoso, Alman, Rianto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The dynamics of the global strategic environment have an impact on world threats in the future. Indonesia has set a vision until 2045. How urgent matters must be prepared within the best policy framework to achieve the desired goals. This research uses Lukman Yudho Prakoso's policy implementation theory and qualitative descriptive methods. The research results show that there are still many things related to urgent policies that are carried out in an integrative, interactive, transparent, controlled and accountable manner; The results of the research show that several strategies are needed so that maritime policies are implemented effectively and efficiently in achieving the vision of a golden Indonesia 2045. As a recommendation, strategic steps are needed such as improving maritime infrastructure, strengthening maritime security, sustainable management of marine resources, developing the maritime economy, strengthening human resources, increasing transparency and accountability, as well as cross-sector collaboration to achieve these goals.

Urgensi Kebijakan Maritim Menyongsong Indonesia Emas 2045

Lukman Yudho Prakoso^{1*}, Fariel Zulfikar Alman², Rianto³

¹Universitas Pertahanan RI

²Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia

³Institut Pariwisata Trisakti

Corresponding Author: Lukman Yudho Prakoso lukman.prakoso@idu.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Urgensi, Kebijakan, Maritim, Indonesia, Emas

Received : 06 Mei

Revised : 26 Mei

Accepted: 28 Juni

©2024 Prakoso, Alman, Rianto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Dinamika lingkungan strategis global berdampak kepada ancaman dunia di masa yang akan datang. Indonesia telah menetapkan visi sampai 2045. Bagaimana hal urgen harusdisiapkan dalam kerangka kebijakan terbaik untuk meraih tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Lukman Yudho Prakoso dan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak hal terkait kebijakan yang urgen dilakukan secara integratif, interaktif, transparan, terkontrol dan akuntabel; hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan beberapa strategi agar kebijakan maritim dan dilaksanakan dengan efektif dan efisien dalam meraih visi inonesia emas 2045. Sebagai rekomendasi adalah Diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur maritim, penguatan keamanan laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi maritim, penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut.

PENDAHULUAN

Menghadapi tahun 2045, Indonesia akan dihadapkan pada berbagai ancaman global yang semakin kompleks, terutama di bidang maritim. Visi Indonesia Emas 2045 bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat, namun hal ini tidak lepas dari tantangan yang signifikan.

Salah satu ancaman utama adalah meningkatnya aktivitas ilegal di perairan Indonesia, termasuk illegal fishing, penyelundupan, dan perdagangan manusia. Menurut laporan Food and Agriculture Organization (FAO), perikanan ilegal di Asia Tenggara diperkirakan merugikan negara-negara di kawasan tersebut hingga miliaran dolar setiap tahunnya (FAO, 2016). Aktivitas ini tidak hanya merusak ekosistem laut tetapi juga mengancam keamanan pangan dan ekonomi maritim Indonesia.

Selain itu, perkembangan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik juga menjadi ancaman serius. Persaingan antara kekuatan besar seperti Amerika Serikat dan China untuk pengaruh di kawasan ini dapat memicu ketegangan dan konflik maritim. Menurut Wibisono (2020), Laut China Selatan menjadi salah satu titik panas di mana klaim teritorial yang tumpang tindih dan aktivitas militer dapat memicu insiden yang lebih besar, mengancam stabilitas regional dan keamanan maritim Indonesia.

Perubahan iklim juga menambah lapisan kompleksitas terhadap ancaman maritim. Peningkatan permukaan air laut dan perubahan pola cuaca dapat menyebabkan bencana alam yang lebih sering dan intens, seperti badai dan gelombang tinggi yang mengancam infrastruktur pantai dan keselamatan pelayaran (IPCC, 2019). Hal ini juga berdampak pada degradasi lingkungan laut, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Untuk menghadapi ancaman ini, Indonesia perlu mengadopsi strategi maritim yang komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini termasuk memperkuat kemampuan pengawasan dan penegakan hukum maritim, mempererat kerja sama internasional untuk keamanan maritim, dan meningkatkan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim. Selain itu, teknologi canggih seperti sistem pengawasan berbasis satelit dan kecerdasan buatan harus diintegrasikan ke dalam strategi pertahanan maritim Indonesia untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan di perairan nasional.

Pada artikel ini akan dianalisis bagaimana tingkat urgensi kebijakan maritim, dengan menganalisis bagaimana implementasinya saat ini dan selanjutnya bagaimana strategi terbaik agar kebijakan maritim dapat optimal dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori implementasi kebijakan publik Lukman Yudho Prakoso (2010) mengedepankan lima faktor utama yang relevan dalam penelitian urgensi kebijakan maritim untuk Indonesia Emas 2045. Integrasi merujuk pada koordinasi lintas sektor dan lembaga dalam pelaksanaan kebijakan. Interaktif menekankan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Transparan mempertegas keterbukaan informasi dan proses kebijakan. Control berfokus pada mekanisme pengawasan yang efektif, sementara akuntabilitas menyoroti

pertanggungjawaban dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan.

METODOLOGI

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang berfokus pada penggambaran secara mendalam dan rinci tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks penelitian "Urgensi Kebijakan Maritim Menyongsong Indonesia Emas 2045", metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, menggambarkan, dan menganalisis urgensi kebijakan maritim dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena sosial atau masalah tertentu melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Data yang dikumpulkan biasanya berupa kata-kata, gambar, atau objek yang memberikan informasi mengenai kondisi, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok yang terlibat dalam fenomena tersebut (Creswell, 2013).

HASIL PENELITIAN

Menggunakan teori implementasi kebijakan publik Lukman Yudho Prakoso, kita dapat menganalisis urgensi kebijakan maritim dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045 melalui lima faktor utama: integratif, interaktif, transparan, kontrol, dan akuntabilitas.

1. Integratif

Faktor integratif dalam kebijakan maritim menekankan pentingnya keselarasan dan koordinasi antar sektor dan lembaga yang terlibat. Dalam konteks ini, kebijakan maritim harus terintegrasi dengan kebijakan nasional lainnya, seperti ekonomi, lingkungan, dan pertahanan. Menurut Prakoso (2018), kebijakan yang terintegrasi mampu mengatasi fragmentasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan. Contohnya, integrasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan patroli maritim dan penegakan hukum di laut, sehingga mengurangi kegiatan illegal fishing dan meningkatkan keamanan laut.

2. Interaktif

Faktor interaktif mengacu pada kolaborasi dan partisipasi berbagai pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan. Kebijakan maritim yang efektif harus melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat. Prakoso (2018) menekankan bahwa partisipasi aktif dari semua pihak dapat meningkatkan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan. Contohnya, pelibatan nelayan lokal dalam pengambilan keputusan mengenai zona penangkapan ikan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan dan keberlanjutan sumber daya laut.

3. Transparan

Transparansi adalah faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan maritim. Menurut Prakoso (2018), transparansi dalam kebijakan publik

melibatkan penyediaan informasi yang jelas dan aksesibel bagi semua pemangku kepentingan. Dalam konteks kebijakan maritim, transparansi dapat diterapkan melalui publikasi data mengenai alokasi sumber daya, hasil tangkapan ikan, dan laporan kinerja instansi maritim. Ini membantu mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

4. Kontrol

Faktor kontrol atau pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan maritim dilaksanakan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Prakoso (2018) menyarankan adanya mekanisme pengawasan yang kuat, termasuk audit internal dan eksternal serta pemantauan berkala oleh badan independen. Dalam kebijakan maritim, pengawasan dapat dilakukan melalui patroli laut, inspeksi kapal, dan monitoring berkelanjutan terhadap aktivitas perikanan dan pelayaran. Efektivitas kontrol ini akan membantu mencegah praktik ilegal dan memastikan bahwa kebijakan maritim berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab pemerintah dalam menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan maritim kepada publik. Prakoso (2018) menekankan pentingnya mekanisme pelaporan yang jelas dan evaluasi kinerja yang rutin. Dalam kebijakan maritim, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui laporan tahunan mengenai status dan perkembangan kebijakan, serta adanya forum publik untuk mengkritisi dan memberikan masukan. Hal ini memastikan bahwa pemerintah dan lembaga terkait bertanggung jawab atas hasil dan dampak kebijakan yang diimplementasikan.

Dengan menerapkan teori implementasi kebijakan publik dari Lukman Yudho Prakoso, analisis ini menunjukkan bahwa kebijakan maritim yang integratif, interaktif, transparan, terkontrol, dan akuntabel sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Penerapan kelima faktor ini dapat membantu mengatasi berbagai tantangan maritim yang dihadapi Indonesia dan memastikan keberlanjutan serta keberhasilan kebijakan maritim di masa depan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Lukman Yudho Prakoso, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan maritim yang integratif, interaktif, transparan, terkontrol, dan akuntabel untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Faktor Pendukung

1. Integratif

Faktor pendukung utama dari aspek integratif adalah adanya kerjasama lintas sektor dan lintas lembaga yang kuat. Integrasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan TNI Angkatan Laut serta lembaga

lainnya memungkinkan adanya koordinasi yang baik dalam pengelolaan sumber daya laut dan keamanan maritim. Dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang canggih juga mempermudah integrasi data dan informasi antar lembaga (Prakoso, 2018).

2. Interaktif

Partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat pesisir, nelayan, akademisi, dan sektor swasta, merupakan faktor pendukung utama dari aspek interaktif. Kebijakan maritim yang dirumuskan berdasarkan input dari berbagai pihak cenderung lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Inisiatif seperti musyawarah maritim dan forum dialog terbuka dapat meningkatkan interaksi dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat (Prakoso, 2018).

3. Transparan

Transparansi didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Sistem e-governance dan portal informasi publik yang terbuka memudahkan akses masyarakat terhadap informasi kebijakan maritim. Selain itu, adanya regulasi yang mewajibkan pemerintah untuk mempublikasikan laporan kinerja dan data anggaran juga menjadi faktor pendukung transparansi (Prakoso, 2018).

4. Kontrol

Pengawasan yang efektif didukung oleh adanya mekanisme audit yang kuat dan independen, baik internal maupun eksternal. Penggunaan teknologi pengawasan seperti satelit dan drone untuk pemantauan aktivitas maritim juga meningkatkan efektivitas kontrol. Kebijakan yang menetapkan sanksi tegas terhadap pelanggaran juga menjadi faktor pendukung dalam aspek ini (Prakoso, 2018).

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas didukung oleh adanya sistem pelaporan yang transparan dan mekanisme evaluasi yang rutin. Forum-forum publik dan media massa yang kritis terhadap kebijakan maritim juga membantu meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Selain itu, adanya lembaga-lembaga independen yang berfungsi sebagai watchdog turut memperkuat akuntabilitas (Prakoso, 2018).

Faktor Penghambat

1. Integratif

Hambatan utama dari aspek integratif adalah birokrasi yang kaku dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral yang menghambat kerjasama yang efektif. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dana juga menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan yang terintegrasi (Prakoso, 2018).

2. Interaktif

Hambatan dalam aspek interaktif meliputi kurangnya partisipasi masyarakat akibat minimnya sosialisasi dan edukasi mengenai kebijakan maritim. Ketidakpercayaan antara pemerintah dan masyarakat juga

menjadi hambatan signifikan. Selain itu, kurangnya infrastruktur untuk mendukung partisipasi masyarakat, terutama di daerah terpencil, menghambat interaksi yang efektif (Prakoso, 2018).

3. Transparan

Kurangnya transparansi sering kali disebabkan oleh budaya birokrasi yang tertutup dan korupsi. Hambatan lainnya adalah kurangnya kapasitas dan infrastruktur untuk mengelola dan menyebarkan informasi secara efektif. Keterbatasan akses internet di beberapa daerah juga menjadi penghalang dalam menyebarkan informasi secara transparan (Prakoso, 2018).

4. Kontrol

Pengawasan yang kurang efektif disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang kompeten. Selain itu, adanya tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak tertentu juga dapat mengganggu proses pengawasan yang independen. Hambatan lainnya adalah teknologi pengawasan yang belum optimal dan kurangnya koordinasi antar instansi pengawas (Prakoso, 2018).

5. Akuntabilitas

Hambatan dalam akuntabilitas meliputi rendahnya budaya akuntabilitas di kalangan birokrat dan kurangnya mekanisme sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. Kurangnya transparansi dan akses informasi juga menghambat akuntabilitas. Selain itu, minimnya peran serta masyarakat dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan maritim juga menjadi hambatan signifikan (Prakoso, 2018).

Melalui analisis ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, kebijakan maritim harus ditingkatkan dalam aspek integratif, interaktif, transparan, terkontrol, dan akuntabel. Meskipun terdapat banyak faktor pendukung, beberapa hambatan signifikan juga perlu diatasi melalui reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas dan teknologi, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat.

Setelah melakukan analisis kebijakan maritim menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Lukman Yudho Prakoso, langkah selanjutnya adalah merumuskan strategi yang optimal menggunakan teori Clausewitz, yang mencakup faktor ends, ways, dan means. Carl von Clausewitz, dalam karyanya *On War*, menyatakan bahwa strategi terdiri dari tujuan akhir (ends), cara untuk mencapai tujuan tersebut (ways), dan sumber daya yang digunakan (means).

1. Ends (Tujuan Akhir)

Tujuan Akhir:

Mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan memperkuat ketahanan maritim nasional yang berkelanjutan, aman, dan makmur.

Strategi:

- Mencapai dominasi dan keamanan maritim di kawasan.
- Mengoptimalkan potensi ekonomi maritim untuk kesejahteraan nasional.
- Meningkatkan keberlanjutan lingkungan laut.

2. Ways (Cara untuk Mencapai Tujuan)

a) Integratif

Cara: Meningkatkan koordinasi dan sinergi antara berbagai instansi pemerintah dan sektor terkait.

Koordinasi Antar Lembaga: Membentuk badan koordinasi maritim nasional yang bertugas mengintegrasikan kebijakan antar kementerian dan lembaga terkait. Ini termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, dan Kementerian Perhubungan.

Harmonisasi Kebijakan: Mengharmoniskan kebijakan maritim dengan kebijakan nasional lainnya seperti ekonomi, lingkungan, dan pertahanan untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih kebijakan.

b) Interaktif

Cara: Meningkatkan partisipasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan.

Partisipasi Masyarakat: Mengadakan forum dialog maritim secara rutin dengan melibatkan nelayan, komunitas pesisir, dan industri perikanan.

Kolaborasi Swasta: Mendorong investasi sektor swasta dalam proyek infrastruktur maritim dan teknologi kelautan melalui insentif dan kerjasama publik-swasta.

c) Transparan

Cara: Meningkatkan transparansi dalam implementasi kebijakan maritim.

E-Governance: Membangun platform e-governance untuk menyediakan informasi publik mengenai kebijakan maritim, termasuk data penangkapan ikan, alokasi sumber daya, dan laporan kinerja.

Publikasi Data: Mewajibkan instansi terkait untuk mempublikasikan data dan laporan secara berkala yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

d) Kontrol

Cara: Memperkuat pengawasan dan kontrol dalam pelaksanaan kebijakan maritim.

Pengawasan Teknologi: Menggunakan teknologi canggih seperti satelit, drone, dan sistem informasi geografis (GIS) untuk memantau aktivitas maritim dan memastikan penegakan hukum.

Audit Rutin: Melakukan audit internal dan eksternal secara berkala terhadap implementasi kebijakan maritim untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan.

e) Akuntabilitas

Cara: Meningkatkan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan maritim.

Pelaporan Publik: Mengadakan sesi pelaporan publik tahunan dimana pemerintah menyampaikan kemajuan dan tantangan dalam kebijakan maritim.

Evaluasi Kinerja: Membangun mekanisme evaluasi kinerja yang transparan dan independen untuk menilai efektivitas kebijakan maritim dan memberikan umpan balik untuk perbaikan.

3. Means (Sumber Daya yang Digunakan)

a. Sumber Daya Manusia:

Pelatihan dan Pendidikan: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi di bidang maritim.

Rekrutmen: Merekrut tenaga ahli maritim yang kompeten dan berpengalaman untuk memperkuat instansi terkait.

b. Teknologi:

Investasi Teknologi: Mengalokasikan dana untuk pengembangan dan pengadaan teknologi maritim canggih, seperti kapal patroli modern, sistem radar, dan alat pemantau lingkungan laut.

Inovasi: Mendorong penelitian dan pengembangan teknologi maritim melalui kolaborasi dengan universitas dan lembaga penelitian.

c. Keuangan:

Anggaran: Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kebijakan maritim, termasuk infrastruktur, teknologi, dan operasional.

Pendanaan Alternatif: Mencari sumber pendanaan alternatif seperti kemitraan publik-swasta dan bantuan internasional untuk proyek-proyek maritim.

Dengan menerapkan teori Clausewitz dalam bentuk ends, ways, dan means, kebijakan maritim yang dihasilkan dari analisis berdasarkan teori Lukman Yudho Prakoso dapat dioptimalkan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, dan akuntabilitas menjadi pilar utama yang didukung oleh sumber daya manusia, teknologi, dan keuangan yang memadai.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki garis pantai yang panjang dan wilayah maritim yang luas. Kekayaan dan potensi maritim yang dimiliki Indonesia menjadi aset strategis yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi dan keamanan nasional. Menyongsong visi Indonesia Emas 2045, kebijakan maritim yang kuat dan terintegrasi menjadi urgensi yang tidak dapat diabaikan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kebijakan maritim sangat mendesak:

Penguatan Ekonomi Maritim

Potensi ekonomi maritim Indonesia meliputi perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut, dan sumber daya alam bawah laut. Menurut Sukardi Rinakit (2016), penguatan sektor maritim dapat berkontribusi signifikan terhadap peningkatan PDB dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Tanpa kebijakan maritim yang jelas dan terstruktur, potensi ini tidak akan tergarap maksimal.

Keamanan dan Pertahanan Nasional

Wilayah maritim Indonesia merupakan jalur perdagangan internasional yang sangat strategis. Laut China Selatan dan Selat Malaka adalah contoh dari perairan yang krusial bagi perdagangan global. Konflik di Laut China Selatan menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan penjagaan wilayah maritim. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menekankan bahwa tanpa kebijakan yang tegas dan implementasi yang kuat, kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia akan terancam .

Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Sumber daya laut, termasuk ikan, terumbu karang, dan minyak bumi, memerlukan pengelolaan yang berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Menurut Yuli Andriani (2020), kebijakan maritim yang mengintegrasikan aspek konservasi dan eksploitasi berkelanjutan akan membantu menjaga keseimbangan ekosistem laut dan manfaat ekonomi bagi generasi mendatang .

Mendukung Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Kebijakan maritim yang kuat merupakan komponen kunci untuk mencapai visi ini. Menurut Presiden Joko Widodo, pengembangan ekonomi maritim adalah salah satu dari lima pilar utama dalam strategi pembangunan nasional .

Penegakan Hukum dan Kedaulatan Laut

Masalah seperti illegal fishing, penyelundupan, dan pelanggaran wilayah sering terjadi di perairan Indonesia. Dengan kebijakan maritim yang efektif, penegakan hukum di laut dapat ditingkatkan, sehingga kedaulatan maritim dan hak berdaulat Indonesia dapat terlindungi.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Urgensi kebijakan maritim dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 adalah suatu keniscayaan. Penguatan ekonomi maritim, keamanan dan pertahanan nasional, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dukungan terhadap visi Indonesia Emas 2045, dan penegakan hukum serta kedaulatan laut adalah beberapa alasan utama yang mendasari pentingnya kebijakan ini. Dengan implementasi kebijakan yang efektif, Indonesia dapat memaksimalkan potensi maritimnya dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Urgensi kebijakan maritim dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi, keamanan nasional, pengelolaan sumber daya laut, dan dukungan terhadap visi pembangunan nasional. Diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan infrastruktur maritim, penguatan keamanan laut, pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengembangan ekonomi maritim, penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan tersebut. Implementasi kebijakan maritim yang

efektif akan membantu Indonesia memperkuat kedaulatannya di laut dan mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan mengenai urgensi kebijakan maritim dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dapat memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek kunci yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam penelitian tersebut, dapat dilakukan analisis lebih mendalam terhadap strategi pengembangan infrastruktur maritim, penguatan keamanan dan pertahanan laut, model pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, upaya pengembangan ekonomi maritim yang inklusif, dan strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor maritim. Selain itu, penelitian lanjutan dapat mempertimbangkan faktor-faktor politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan yang memengaruhi implementasi kebijakan maritim serta menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan Indonesia Emas 2045 secara keseluruhan. Penelitian lanjutan ini akan memberikan kontribusi penting dalam merumuskan langkah-langkah konkret untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan maritim dalam mendukung visi pembangunan nasional Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

- Clausewitz, C. v. (1832). *On War*. Princeton University Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications.
- FAO. (2016). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2016*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- IPCC. (2019). *Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Kasih Prihantoro, Arif Darmawan, Zakariya ., Lukman Yudho Prakoso; , "Implementation Study of Public Policies, Synergicity of Policy for Defense Area and National Area Spatial in Grati Pasuruan", *Public Policy and Administration Research*, 9, Public Policy and Administration Research, 33-39, 2019, IISTE
<https://iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/50404>
- Madrohim, Madrohim; Prakoso, Lukman Yudho; , *The Total War Strategy Through the Improvement of the Role of National Shipyard in Supporting Main Weapon System of Indonesian Navy*, *Journal of Social and Political Sciences*, 4, 1, 1-10, 2021, The Asian Institute of Research
- Prakoso, L. Y. (2010). *Teori Implementasi Kebijakan Publik: Konsep, Kerangka Analisis dan Studi Implementasi di Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Prakoso, L. Y. (2015). *Public Policy Implementation in Indonesia: Concepts and Practice*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prakoso, L. Y. (2018). *Integrasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Maritim Indonesia*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(2), 145-160.
- Prakoso, L. Y. (2018). *Teori dan Praktik Implementasi Kebijakan Publik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Adhitama.
- Prakoso, L. Y. (2020). *Interaktifitas Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Maritim: Studi Kasus Pembangunan Pelabuhan*. *Jurnal Kebijakan Maritim*, 12(1), 32-45.
- Prakoso, L. Y. (2022). *Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut: Tantangan dan Peluang bagi Indonesia Emas 2045*. *Jurnal Maritim Indonesia*, 15(2), 78-92.
- Risahdi, Muhammad; Jaddawi, Murtir; Achmad, Mansyur; Henny, Andi; Prakoso, Lukman Yudho; Martani, Wuri Retno; , *Ambiguous policy on*

securing the vital objects of the Indonesian armed forces in east java, Public Policy and Administration Research, 10, 1, 2020, International Knowledge Sharing Platform

Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso; ,Membangun Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Studi pada Masyarakat Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat dalam Rangka Pertahanan Negara, Membangun Indonesia: Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif, Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan, 68-66, 2018, Indonesia Qualitative Researcher Associations (IQRA)

Suhirwan, Lukman Yudho Prakoso; ,Strategi Pertahanan Dalam Penanganan Kejahatan Lintas Negara Di Perbatasan Laut Manado Sulawesi Utara Tahun 2017, Membangun Indonesia: Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif, transnational organized crime, 67-81, 2018, Indonesia Qualitative Researcher Association (IQRA)

Suhirwan; Prakoso, LY; Sianturi, D; Adriyanto, A; Damayanti, R; ,Sea Defense Strategy Implementation Against Asymmetric Warfare Threats For Securing International Shipping Lanes In The Sunda Strait, 3th Indonesia International Defense Science Seminar, 3, "Terrorism, Cyber Threats, Disaster", 2019, Indonesia Defense University

Agus Damar Jaya, Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso, Purwanto ., Dohar Sianturi, Resmanto Widodo Putro; ,Sea Defense Strategy of Anti-Submarine on We Island, International Affairs Global Strategy, 81, Defense Strategy, 15-20, 2020, IISTE
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/IAGS/article/view/51905>

Sujianto ., Suhirwan ., Lukman Yudho Prakoso; ,Policy Analysis of Indonesian Naval Depot Services in Surabaya, Public Policy And Administration Research, 10, Defense Strategy, 43-45, 2020, IISTE
<https://www.iiste.org/Journals/index.php/PPAR/article/view/52111/53847>

Wayan Redita, Lukman Yudho Prakoso, Hipdizah Hipdizah; ,Implementasi Kebijakan Vessel Traffic Services Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Di Selat Sunda Dalam Keselamatan Pelayaran Terhadap Strategi Pertahanan Laut, Jurnal Strategi Pertahanan Laut Universitas

Pertahanan,6,Vessel Traffic Services,31-44,2020,Universitas Pertahanan Indonesia [http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL ...](http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/SPL)

Hendri, H; Handoko, R; Darmawan, A; Prakoso, LY; Daengs, GS Achmad; ,The paradigm of Character Building Between Hope and Challenge,,,,,2019,

Kurniawan, Cecep; Widyarto, Setyawan; Prakoso, Lukman Yudho; ,Implementasi Struktur Birokrasi Strategi Pertahanan Laut Menghadapi Ancaman di Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara,Strategi Pertahanan Laut,4,1,,2020,

Jaya, Agus Damar; Prakoso, Lukman Yudho; Suhirwan, Suhirwan; ,"Pertahanan Dan Keamanan Di Selat Singapura Terhadap Peningkatan Pembajakan, Konsistensi Kebijakan Publik, Dan Konsesi Wilayah Negara Litoral",Strategi Pertahanan Laut,7,1,67-82,2022,

Wibisono, Y. (2020). Geopolitical Dynamics in the Indo-Pacific and Its Implications for Indonesia's Maritime Security. *Journal of Maritime Studies*, 12(1), 34-52